

## DPRD Sentil Saat Penyampaian Rekomendasi LKPj Wali Kota Alokasi Anggaran Rumah Sakit Tak Efektif



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Senin, 29/04/2024

Meski sudah dianggarkan sejak tahun lalu, pembangunan dua rumah sakit, yakni di Balikpapan Barat dan Timur tak kunjung terealisasi. DPRD menyebut perencanaan kurang matang.

**BALIKPAPAN** – Fraksi-fraksi di DPRD Balikpapan sempat menyinggung rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat dan Timur. Ini saat penyampaian rekomendasi DPRD Balikpapan melalui fraksi-fraksi atas LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2023.

Sebab sejak tahun lalu, alokasi anggaran terhadap pembangunan rumah sakit sudah masuk dalam APBD Balikpapan. Namun, pembangunan infrastruktur belum bisa terlaksana karena terhalang masalah sengketa lahan. Legislatif menilai hal ini tidak efektif.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, rencana pembangunan rumah sakit yang tertunda ini memang karena harus menaati proses hukum. Namun dia berpendapat, bagaimanapun ini ada faktor dari perencanaan yang kurang matang.

“Ternyata setelah masuk rencana dan diberi alokasi anggaran, lahan masih bermasalah dan perlu menunggu putusan hukum,” ujarnya. Walau saat ini sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan kemenangan Pemkot Balikpapan.

Alhasil, akhirnya proyek baru bisa mulai berjalan pada tahun ini. Teranyar, Pemkot Balikpapan telah mengajukan permohonan eksekusi lahan rumah sakit ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Budiono menuturkan, seharusnya pembangunan rumah sakit sudah berjalan.

“Kalau dari kemarin sudah jalan mungkin pembangunan sekarang sudah selesai,” katanya. Kini, lelang pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat masih berproses. Rencananya, Pemkot Balikpapan mendirikan rumah sakit tipe C di lahan yang berlokasi di Jalan Perikanan RT 16 Kelurahan Baru Ulu.

Namun, proyek tak lagi menggunakan skema tahun jamak atau *multiyears*. Melainkan hanya anggaran tahun tunggal. Adapun total Rp125 miliar kebutuhan anggaran. Kini, tahap awal anggaran tidak sampai Rp100 miliar. Sehingga, pembangunan harus dilakukan bertahap.

“Begitu juga rumah sakit di Balikpapan Timur seharusnya bisa segera dibangun ternyata belum,” tuturnya. Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum Andi Sri Juliarty memastikan, pembangunan rumah sakit Balikpapan Timur tetap berjalan dan tidak tertunda.

“Hanya masih dalam tahapan administrasi, seperti desain, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan kebutuhan dokumen lainnya,” ungkapnya. Sementara untuk pembangunan kontruksi lebih dahulu fokus pada rumah sakit di Balikpapan Barat. Dia menambahkan, teknisnya diatur oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Selain bidang kesehatan, fraksi-fraksi juga menyoroti masalah pendidikan jelang PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

Mengingat masih perlu terus membangun sekolah baru untuk menambah daya tampung. Lulusan SD kurang lebih 12 ribu siswa dan daya tampung SMP masih kurang dari 7 ribu siswa. **(ms/k15)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, DPRD Sentil saat Penyampaian Rekomendasi LKPj Wali Kota Alokasi Anggaran Rumah Sakit Tak Efektif, 29/04/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Permen PUPR 22/2018) bahwa bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam Pasal 13 Permen PUPR 22/2018 diatur bahwa bangunan gedung negara dalam memenuhi klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikelompokkan menjadi:
  - a. bangunan gedung kantor,

- b. rumah negara, dan
  - c. bangunan gedung negara lainnya.
3. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Permen PUPR 22/2018 bahwa bangunan gedung negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. bangunan gedung pendidikan;
  - b. bangunan gedung pendidikan dan pelatihan;
  - c. bangunan gedung pelayanan kesehatan;
  - d. bangunan gedung parkir; dan
  - e. bangunan gedung pasar.